CALL FOR PAPER
Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com

Analisis Penerapan Penyusutan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Aru

Sinplisius Atbar[1], Fanny Monika Anakotta[2], Theophilia F. F. Leiwakabessy[3]

[1]PSDKU di Kab. Kep. Aru, Universitas Pattimura, email: sinplisiusatbar@gmail.com
[2]FEB, Universitas Pattimura, email: monicfanny@gmail.com
[3]FEB, Universitas Pattimura, email: philiafina89@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis data deskriptif, (*descriptive analysis method*) dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat di sajikan dan di informasikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dan daftar inventaris aset tetap Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei pendahuluan, studi kepustakaan, pengamatan atau observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dan pengolahan data dilakukan secara analisis deskriptif yang dilakukan dengan tahapan mengumpulkan data, mengevaluasi kebenaran data, reduksi data, menghitung penyusutan aset tetap, menyajikan data hasil perhitungan, menyimpulkan kondisi penerapan penyusutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru belum menerapkan penyusutan aset tetap dan penyajiannya dalam laporan keuangan sesuai amanat SAP PP 71 Tahun 2010. Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai aset tetap di neraca disajikan terlalu tinggi (*overstated*) sebesar Rp 1.069.159.724,

Kata Kunci : Penyusutan Aset tetap, Laporan Keuangan.

Abstract

This study aims to determine the application of fixed asset depreciation in the financial statements of the One Stop Investment and Service Office of Aru Islands Regency. This research is a qualitative descriptive study with a descriptive analysis method, where data is collected, compiled, interpreted and analyzed. thus enabling research findings to be presented and informed to others. This study uses financial statement data and an inventory list of fixed assets of the Aru Islands Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office. Data collection techniques used are preliminary survey, literature study, direct observation or observation, interviews and documentation. Data analysis techniques and data processing were carried out by descriptive analysis which was carried out with the stages of collecting data, evaluating the truth of the data, reducing data, calculating depreciation of fixed assets, presenting data from calculations, concluding the conditions of application of depreciation. The results of this study indicate that the Investment and One Stop Service Office of Aru Islands Regency has not implemented fixed asset depreciation and its presentation in the financial statements according to the mandate of SAP PP 71 of 2010. From the results of the analysis, it is known that the value of fixed assets on the balance sheet is overstated at Rp 1,069,159,724

***Key words**: Depreciation of Fixed Assets, Financial Statements.*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiataan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (SAP PP 71 Tahun 2010). Neraca merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan karena menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu.

Aset tetap mepunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi, 2014).

Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah (Mulalinda dan Steven, 2014). Pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntanbel, efisien dapat terwujudkan serta adanya kepastian nilai yang berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, (Yusuf, 2011). Nilai wajar aset merupakan informasi yang butuhkan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset tetap. Menurut Mursyidi (2009) penyusutan memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi tentang potensi aset tetap yang dimilikinya

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru belum menerapkan penyusutan aset tetap. Hal ini sesuai dengan fakta yang terlihat dalam laporan keuangan beberapa tahun terakhir yang selalu menyajikan nilai penyusutan aset tetap pada nilai nol. Permasalahan penyusutan ini akan berpengaruh terhadap informasi nilai wajar aset tetap dalam laporan keuangan. Terkait dengan fenomena diatas maka nilai penyusutan aset tetap perlu disajikan dalam laporan keuangan (Bultek SAP No 05)

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: apakah penerapan penyusutan aset tetap sudah sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap dan nilai penyusutan aset tetap sudah disajikan dalam laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru?

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru.

KAJIAN TEORI

Pengertian Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Nilai penyusutan masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional ((PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010)

Menurut Kieso (2008). Penyusutan didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban dengan cara sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan.

Tujuan Penerapan Penyusutan

Tujuan penerapan penyusutan adalah agar pemerintah mendapat suatu informasi tentang keadaan potensi aset agar digunakan untuk pengambilan keputusan. Penyusutan memungkinkan pemerintah setiap tahun dapat memperkirakan sisa manfaat aset tetap yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh beberapa tahun ke depan. Hal ini akan memberi informasi kepada pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki (Bultek Nomor 05 Tentang Akuntansi Penyusutan)

Metode Penyusutan

Berdasarkan SAP PP 71 Tahun 2010 maka metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain :

1. Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

2. Metode Saldo Menurun Berganda

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{1}{\text{Masa manfaat}} \times 100\% \times 2$$

3. Metode Unit Produksi.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang disusutkan}}{\text{Perkiraan total output}}$$

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (SAP PP 71 Tahun 2010).

Indra Bastian (2002) aset tetap "Adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

Menurut Hery (2016) Aset tetap adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaanya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang. Pendapat lain Zaky Baridwan (2004) mengemukakan bahwa "aset tetap adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal.

Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010 adalah :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan Pemerintah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah (Permendagri No 4 Tahun 2008).

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. (SAP PP 71 Tahun 2010).

Asumsi Dasar Laporan Keuangan Pemerintah

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah menurut SAP PP 71 Tahun 2010 adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

1. Asumsi kemandirian entitas
2. Asumsi kesinambungan entitas
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Arti Pentingnya Penyusutan dalam Laporan Keuangan

Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi tentang nilai aset tetap yang memadai.

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah dapat melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Mengingat aset tetap memiliki masa manfaat yang panjang, maka aset tetap merupakan suatu unsur laporan keuangan pemerintah yang paling konkrit mengemban asumsi perlunya pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan antargenerasi.

Dengan adanya penyusutan pemerintah dapat memperkirakan sisa manfaat aset tetap dan mendapat informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya. Sehingga pemerintah menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap tersebut. (Bultek 05 Akuntansi Penyusutan)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena jenis penelitian kualitatif yaitu; mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Menurut Moleong (2005) dalam Simamora dan Abdul (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlakuan penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan dengan membatasi pada akun akumulasi penyusutan aset tetap dan laporan keuangan periode 2019. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu selaku entitas akuntansi dan BPKAD Kabupaten kepulauan Aru selaku entitas pelaporan keuangan daerah.

Definisi Operasional

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (SAP PP 71 Tahun 2010).

Penghitungan besarnya penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan metode penyusutan. PSAP 07(PP 71 Tahun 2010) paragraf 57 menyediakan tiga metode yang dapat digunakan antara lain : Metode garis lurus (*straight line method*), Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*) dan Metode unit produksi (*unit of production method*). Entitas pemerintah dapat menggunakan salah satu dari ketiga metode tersebut.

Berdasarkan Perbup Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, maka metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap pada penelitian ini adalah metode garis lurus (*straight line method).*

Tarif penyusutan aset dihitung dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada peneltian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa kebijakan akuntansi, dan peraturan-peraturan terkait penyusunan laporan keuangan serta literatur-literatur yang mendukung. Sedangkan data

kuantitatif yaitu berupa laporan keuangan dan laporan aset tetap.Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, data sekunder diperoleh melalui media perantara seperti catatan, dokumen, struktur organisasi, internet, data penelitian sebelumnya, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian dan dapat mendukung kelengkapan data primer.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi , wawancara, studi pustaka, dokumentasi, *internet searching.*

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif *(descriptive analysis method),* dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi. dengan mendeskriptifkan penyusutan aset tetap disesuaikan dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010.

Data-data yang dianalisis berupa data laporan keuangan dan laporan yang terkait dengan penyusutan aset tetap, nilai perolehan aset serta masa manfaat aset. Aktivitas dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan, untuk memahami latar belakang dan kondisi penerapan akuntansi pemerintah terutama penerapan penyusutan aset tetap. Data-data yang dikumpulkan antara lain data laporan keuangan dan laporan aset tetap beberapa tahun terakhir, kebijakan akuntansi, hasil wawancara, peraturan-peraturan, buku, dan artikel yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap.
2. Mengevaluasi kebenaran data aset tetap dilakukan dengan :
   - Meninjau kembali data belanja modal dengan penambahan aset tetap di neraca apakah sudah sesuai jumlah dan peruntukannya.
   - Meninjau kembali perubahan aset tetap (penambahan maupun pengurangan) yang tertera di neraca dengan daftar mutasi barang dan pengungkapannya pada Catatan atas Laporan Keuangan.
   - Membandingkan jumlah aset tetap di neraca dengan jumlah yang dicantumkan pada daftar inventaris barang.
3. Reduksi data (*data reduction*), memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data aset tetap yang dapat disusutkan, nilai perolehan, masa manfaat dan menentukan metode penyusutan sesuai landasan teori.
4. Melakukan simulasi perhitungan penyusutan sesuai dengan metode penyusutan yang disarankan.
5. Penyajian data, yaitu dengan menyusun informasi berupa data hasil simulasi perhitungan penyusutan dan menyajikannya dalam laporan keuangan sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
6. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif untuk memberikan informasi kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Menyimpulkan kodisi penerapan penyusutan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai SAP PP Nomor 71 Tahun 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum menerapkan penyusutan. Juga dari informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan penyajian akun akumulasi penyusutan pada neraca laporan keuangan yang selalu bernilai nol dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil wawancara, penyusutan sebenarnya tidak dikelola sendiri oleh pihak Dinas melainkan hanya memakai aplikasi SIMDA dari BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru. Hal ini sesuai dengan data neraca laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 yang menyajikan nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp. 45.026.440.916. sedangkan pada neraca laporan keuangan Dinas selaku entitas akuntansi nilai akumulasi penyusutan belum disajikan.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sesuai kartu inventaris barang peralatan mesin (KIB B) sebesar Rp 2,166,421,000 dan aset gedung bangunan (KIB C) sebesar Rp 233,250,000.

Metode penyusutan yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu adalah metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan Perbup Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pembahasan

Perhitungan Penyusutan Aset tetap

Berdasarkan metode garis lurus, nilai penyusutan aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.
Rumus metode garis lurus (*straight line method*) :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Dari KIB B diketahui: Harga perolehan sepeda motor sebesar Rp 25.000.000, pembelian pada tahun 2015, kondisi dalam keadaan baik, masa manfaat 7 tahun sesuai Peraturan Bupati nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi. Maka nilai penyusutan dihitung sebagai berikut :
Rp 25.000.000/7 = Rp 3.571.428, sehingga nilai penyusutan pertahun sebesar Rp 3.571.428. Penyusutan persemester : Rp 3.571.428/2 = Rp 1.785.714.

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 = Nilai penyusutan pertahun + akumulasi penyusutan, maka Rp 3.571.429 + Rp 10.714.286 = Rp 14.285.714. Nilai Buku = Nilai perolehan – akumulasi penyusutan per 31 desember. Rp 25.000.000 – Rp 14.285.714 = Rp 10.714.286.

Perhitungan demikian diterapkan untuk seluruh aset tetap yang dapat disusutkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil perhitungan untuk seluruh aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Penyusutan Aset

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Masa Manfaat	Penyusutan per Tahun	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
ASET TETAP					
Pralatan dan Mesin	2.166.421.000		444.597.448	1.058.829.724	1.107.591.276
Alat-alat Angkutan	100.000.000	7	14.285.714	57.142.857	42.857.143
Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.795.000	5	759.000	2.277.000	1.518.000
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.909.329.000	5	404.310.000	954.665.000	954.664.000
Alat Studio dan Alat Komunikasi	108.297.000	5	21.659.400	37.578.200	70.718.800
Alat Laboratorium	45.000.000	15	3.583.333	7.166.667	37.833.333
Gedung dan Bangunan	233.250.000	50	4.665.000	10.330.000	222.920.000
Aset tetap Lainnya	58.100.000	-	-	-	-
	2.457.771.000		449.262.448	1.069.159.724	1.330.511.276

Sumber : Data olah, 2022

Penyajian Nilai Penyusutan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. (SAP PP 71 Tahun 2010) sebagai berikut :

1. Penyajian Penyusutan Aset Tetap Dalam Neraca
   Penyajian hasil perhitungan penyusutan aset tetap dalam neraca dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penyajian Penyusutan Aset Tetap di Neraca

URAIAN	2019	2018
ASET		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.367,90
Jumlah Aset Lancar	0,00	2.367,90
Investasi Jangka Panjang		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.166.421.000,00	2.230.758.000
Gedung dan Bangunan	233.250.000	233.250.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	58.100.000,00	0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.069.159.724,00)	0,00
Jumlah Aset Tetap	1.388.611.276,00	2.464.008.000,00
Aset Lainnya		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Terwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	113.937.000,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	113.937.000,00	0,00
JUMLAH ASET	1.502.548.276,00	2.464.010.367,90
KEWAJIBAN		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.502.548.276,00	2.464.010.367,90
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.502.548.276,00	2.464.010.367,90

Sumber : data olah, 2022

2. Penyajian Penyusutan Aset Tetap Dalam Laporan Operasional (LO)
   Penyajian hasil perhitungan penyusutan aset tetap dalam dalam laporan operasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Penyajian Penyusutan Aset Tetap di Laporan Operasional

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
Kegiatan Operasional			
Pendapatan –LO	43.310,44	23.187,31	20.123,13
Pendapatan Asli Daerah-LO	-	-	-
Lain-lain PAD yg Sah –LO	43.310,44	23.187,31	20.123,13
Pendapatan Transfer-LO	-	-	-
Beban	5.082.552.724,56	3.717.406.184,89	1.365.146.539,67
Beban Pegawai – LO	1.203.519.155,00	1.295.097.133,00	(91.577.978,00)
Beban Persediaan	437.380.119,56	466.074.875,89	(28.694.756,33)
Beban Jasa	1.393.255.709,00	825.632.251,00	567.623.458,00
Beban Pemeliharaan	116.523.000,00	147.220.000,00	(30.697.000,00)
Beban Perjalanan Dinas	862.715.017,00	983.381.925,00	(120.666.908,00)
Beban Bunga	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.069.159.724,00	-	1.069.159.724,00
Beban Lain-Lain	-	-	-
Surplus/Defisit dari Operasi	(5.082.509.414,12)	(3.717.382.997,58)	(1.365.126.416,54)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(5.082.509.414,12)	(3.717.382.997,58)	(1.365.126.416,54)
Surplus/Defisit-LO	(5.082.509.414,12)	(3.717.382.997,58)	(1.365.126.416,54)

Sumber : data olah, 2022

Interpretasi

Penerapan penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sesuai dengan SAP PP

Nomor 71 Tahun 2010, PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Selaku entitas akuntansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara kelembagaan belum menerapkan penyusutan. Penyusutan masih dikelola oleh BPKAD selaku entitas pelaporan. hal ini bertentangan dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010. Ketidaksesuaian ditinjau dari asumsi kemandirian entitas yang berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi salah saji antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan penyusutan aset tetap belum diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru sehingga tidak sesuai dengan SAP PP nomor 71 Tahun 2010. Akibatnya, nilai akumulasi penyusutan pada neraca selalu bernilai nol dan neraca disajikan terlalu tinggi (*overstated*).
2. Dalam aktivitas penyusutan aset tetap, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum melakukan pencatatan penyusutan aset tetapnya namun dilakukan oleh BPKAD. Hal ini tidak sesuai dengan SAP PP nomor 71 Tahun 2010. Ketidaksesuaian ditinjau dari asumsi kemandirian entitas yang artinya setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi salah saji antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten kepulauan Aru sebagai unit yang mandiri agar menerapkan peyusutan aset tetap sesuai ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Diharapkan penelitian ini memberikan informasi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kedepanya lebih teliti dalam melakukan pelaporan keuangannya, serta melakukan perbaikan terhadap pelaporan yang telah dibuat.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan terus mengembangkan penelitian terkait penyusutan dan memperoleh data belanja pemeliharaan sehinga dapat menganalisis aset tetap apa saja yang mengalami penambahan nilai dan masa manfaat karena adanya perbaikan.

REFERENSI

Buletin Teknis No 05 tentang Akuntansi Penyusutan. Komite Satandar Akuntansi Pemerintah

Baridwan, Zaki. 2004. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Hery. 2016. Mengenal dan Memahami dasar dasar laporan keuangan. PT Grasindo Jakarta.

Indra Bastian (2002) Bastian, Indra dan Soepriyanto. 2002. “Sistem Akuntansi Sektor Publik”. Salemba Empat. Jakarta.

Kieso, Donald E., dkk. (2008). Pengantar Akuntansi. Edisi 7. (Alih Bahasa Desi Adhariani dan Vera Diyanti).Salemba Empat Jakarta.

Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung.

Moleong Lexy.(2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Permendagri No 4 Tahun 2008). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung.

Simamora, Rudianto, and Abdul Halim. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan, vol.13,no 2, September. 2013.

Sahril Rumbaru,Inggriani Elim, Meily Y. B Kalalo 2018. Penerapan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Yusuf, M. 2011. 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

Veronika Mulalinda dan Steven J. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 521-531. ISSN 2303-1174. http://ejournal.unsrat.ac.id. Diakses tanggal 19 April 2021 pukul 15.59 WIT.